# WAKIL KETUA OMBUDSMAN MINTA GUBERNUR JAWA TENGAH LAKUKAN EVALUASI RUTIN PELAYANAN PUBLIK

**Sabtu, 29 Mei 2021 - Bellinda Wasistiyana Dewanty**

Semarang - Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus didampingi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida dan jajaran melakukan kunjungan secara khusus ke Puri Gaden dalam rangka koordinasi penguatan pelayanan publik dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada Jumat (28/5/21).

Ganjar Pranowo menerima kehadiran Wakil Ketua Ombudsman dan jajaran sekaligus menerima secara singkat laporan masyarakat terkait pemerintah daerah di Jawa Tengah yang masuk di tahun 2021. Tercatat sejak Januari hingga 25 Mei 2021 terdapat 5 Kelompok Instansi Terlapor yang paling banyak dilaporkan tahun 2021. Pada urutan pertama, yakni Pemerintah Daerah paling banyak dilaporkan sejumlah 65%, selanjutnya Kepolisian 17%, Pertanahan 14%, BUMN/D 7%, Kementerian 6%.

Dalam pertemuan ini, Bobby menyampaikan bahwa koordinasi kelembagaan ini merupakan hal yang penting mengingat pemerintah daerah di Jawa Tengah menjadi salah satu instansi yang cukup banyak dilaporkan masyarakat.

"Sepanjang tahun 2021 (sampai dengan 25 Mei 2021), setidaknya terdapat 3 dugaan maladminstrasi yang dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, yakni penyimpangan prosedur sebesar 50%, penundaan berlarut sebesar 38%, dan Tidak memberikan pelayanan sebesar 12%," lanjutnya.

Pada pertemuan tersebut ditekankan pula bahwa instansi terlapor yang cukup banyak dilaporkan masyarakat adalah Gubernur Jawa Tengah sebanyak 25%, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 25%, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 25%, Dinas Kehutanan Jawa Tengah 13%, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah 12%.

"Dengan data singkat ini Gubernur dapat melakukan monitoring dan evaluasi diinternal atas mutu pelayanan yang telah diberikan kepada publik," sambungnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga memberikan dukungan terkait pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang akan dilakukan oleh Ombudsman Jawa Tengah terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Selain itu, Gubernur Jawa Tengah juga menekankan pentingnya peran dan tanggung jawab Kepala Daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara lain dengan sinergi bersama Ombudsman RI.

"Momentum koordinasi kelembagaan ini merupakan bentuk pengawasan Ombudsman sekaligus memaksimalkan sisi pencegahan maladminstrasi kepada pemerintah daerah Jawa Tengah, Bobby meminta agar Gubernur melakukan evaluasi secara berkala termasuk dalam hal penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat," tutupnya